BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

II.1 Sejarah PT Kereta Api Indonesia

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengalami berbagai perkembangan sejak jaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Perkembangan kereta api di Indonesia khususnya pulau Jawa mengalami beberapa periode, antara lain :

a. Masa Penjajahan Belanda

Pemerintah Belanda membangun alat transportasi kereta api untuk memperbaiki serta meningkatkan daya angkut sistem transportasi yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan manusia pada saat itu.

Pada tahun 1875, pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan perkeretaapian sendiri yang dikelola oleh suatu jawatan yang berdiri sendiri yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. Sejak saat itu pemerintah kolonial Belanda membangun jalan-jalan kereta api dan memperluas usaha dalam bidang perkeretaapian.

Pada tahun 1875 sampai 1945, jaringan-jaringan kereta api milik negara sudah dibangun di Jawa, Sumatera dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 1888, usaha perkeretaapian pemerintah kolonial Belanda resmi berdiri sendiri dan berbentuk jawatan yang merupakan bagian dari Bugerlijke Openwere Berken (BOW) yang berarti Departemen Pekerjaan Umum. Dan perusahaan kereta api itu sendiri adalah Staats Spooren

Tramwagen. Dengan demikian semakin luasnya usaha perkeretaapian negara yang dikelola jawatan, maka perusahaan-perusahaan perkeretaapian mulai berkurang fungsinya sehingga diambil alih oleh pemerintah kolonial dan digabungkan dengan Staats Spooren Tramwagen dalam satu wadah yang disebut Verenigne Spoored Hedrijven (VSH). Karena berbentuk jawatan, maka nama tersebut diubah menjadi Staatsk Spoorwegen.

Pada masa penjajahan Belanda, pembangunan kereta api dibagi menurut perusahaan yang membuat, yaitu :

1. Netherlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NISM).
    - Lintas Semarang Gudang – Tanggung (1864-1867) yang merupakan ruas jalan rel pertama di Indonesia.
    - Lintas Semarang – Surakarta – Yogyakarta (1864-1873).
    - Lintas Jakarta – Bogor (1869-1873).
    - Lintas Surabaya – Malang (1879).
    - Lintas Bogor – Yogyakarta dan Surabaya – Surakarta (1881-1898).
    - Lintas Yogyakarta – Srandakan (1895).
    - Lintas Yogyakarta – Surakarta (1899) merupakan batang ketiga pada jalan rel tersebut.
    - Lintas Gundih – Surabaya Pasarturi (1900-1903)
2. Staatsk Spoorwegen (SS).
    - Lintas Surabaya – Malang (1879).
    - Lintas Pasuruan – Panarukan (1886-1897).

- Lintas Banten – Jakarta (1899-1900).
- Lintas Kalisat – Banyuwangi (1902-1903).
- Lintas Jakarta – Cirebon (1902-1912).
- Lintas Cirebon – Kroya (1916-1917).

Perusahaan kereta api swasta lainnya antara lain :

3. Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (SJS), membangun lintas Semarang – Pencanyakan.
4. Bataviasche Ooester Spoorweg Maatschappij, membangun lintas Jakarta – Bekasi.
5. Solosche Tramweg Maatschappij, membangun lintas Surakarta – Boyolali (1892).
6. Java Spoorweg Maatschappij, membangun lintas Maos – Purbalingga dan Banjarsari – Wonosobo (1896-1917).
7. Kediri Stoomtram Maatschappij, membangun lintas di daerah Jombang, Kediri dan Pare (1897-1899).
8. Malang Stoomtram Maatschappij, membangun lintas di sekitar Malang dan Singosari (1897-1908).
9. Probolinggo Stoomtram Maatschappij, membangun lintas Probolinggo – Kraksaan – Paiton (1897-1912).
10. Mojokerto Stoomtram Maatschappij, membangun lintas Mojokerto – Barang – Bangil (1898-1899).
11. Pasoeroean Stoomtram Maatschappij, membangun lintas di sekitar Pasuruan dan Wonorejo (1898-1912).

12. Madura Stoomtram Maatschappij, membangun lintas di sekitar Kamal – Kalianget (1899-1902).
13. Babat Jombang Stoomtram Maatschappij, membangun lintas Babat – Jombang (1899-1902).
14. Oos Java Stoomtram Maatschappij, membangun lintas Ujung Kriyan dan lintas di sekitar Mojokerto (1899-1923).

b. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, seluruh jaringan kereta api dikuasai oleh Jepang. Kegiatan perkeretaapian tersebut dimaksudkan untuk mendukung peperangan dan kepentingan politik. Banyak jaringan jalan kereta api dibongkar dan diangkut ke Thailand sehingga kondisi perkeretaapian saat itu mengalami kemunduran dan bahkan mengalami kehancuran. Di Sumatera di bawah pimpinan Angkatan Laut Jepang dengan nama Tetsudotai yang berkantor pusat di Bukit Tinggi. Sedangkan pulau Jawa dikuasai oleh Jepang yang kemudian diberi nama Nikuyu Kyoko yang kemudian berubah menjadi Tetsudo Kyoko yang berkantor pusat di Bandung di bawah pimpinan Angkatan Darat Jepang. Sehingga pembagian wilayah pengusahaan dibagi menjadi tiga wilayah eksploitasi, antara lain :

1. Wilayah Eksploitasi Barat meliputi tiga daerah inspeksi, yaitu :
   - Inspeksi 1 berpusat di Jakarta.
   - Inspeksi 2 berpusat di Cirebon.
   - Inspeksi 3 berpusat di Bandung.

2. Wilayah Eksploitasi Tengah meliputi empat daerah inspeksi, yaitu:
   - Inspeksi 4 berpusat di Purwokerto.
   - Inspeksi 5 berpusat di Semarang.
   - Inspeksi 6 berpusat di Yogyakarta.
   - Inspeksi 7 berpusat di Solo.
3. Wilayah Eksploitasi Timur meliputi empat daerah inspeksi, yaitu :
   - Inspeksi 8 berpusat di Madiun.
   - Inspeksi 9 berpusat di Surabaya.
   - Inspeksi 10 berpusat di Malang.
   - Inspeksi 11 berpusat di Jember.

c. Masa 1945 sampai sekarang

Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, pada pertengahan Agustus 1945 dan disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka seluruh jaringan perkeretaapian diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia yamg selanjutnya pada tanggal 23 September 1945 di Bandung diberi nama Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Tanggal 1 Januari 1950, DKARI berubah menjadi Djawatan Kereta Api (DKA). Pada tanggal 25 Mei 1963 melalui Peraturan Pemerintah No.32/Tahun 1963, status DKA berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Tetapi PNKA tidak berumur lama karena dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.61/Tahun 1971, PNKA diubah menjadi Perusahaan Jasa Angkutan Kereta Api (PERJANKA). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.127/KMK/071979

dan No.96/LD/302/PhB-79 tanggal 30 Maret 1979 tentang pelaksanaan Pendirian Perusahaan Jawatan Kereta Api, PERJANKA berubah menjadi PJKA. Tahun 1991 berubah menjadi PERUMKA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.8/Tahun 1991. Akhirnya berdasarkan Keputusan Presiden No.39/Tahun 1999 pada tanggal 17 Maret 1999 PERUMKA menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

II.2 Tempat dan Kedudukan PT Kereta Api Indonesia

Tempat dan kedudukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DIPO KRL/KRD Bukit Duri berada di JL. Bukit Duri Tanjakan No 1 Jakarta Selatan.

II.3 Bentuk dan Badan Hukum PT Kereta Api Indonesia

II.3.1 Bentuk PT. Kereta Api Indonesia

PT. Kereta Api Indonesia adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang berada di bawah kendali Departemen Perhubungan dengan instansi terkait sebagaimana tercantum pada peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 1990, sedangkan badan usahanya berbentuk PT atau perseroan hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. Bentuk perusahaan umum (Perum), dialihkan menjadi perusahaan perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.

II.3.2 Landasan Hukum

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah N0.2 Tahun 1998 tentang Persero adalah sebagai berikut :

1. Latar Belakang
    - Memberikan peluang seluas-luasnya kepada Persero untuk mengembangkan usaha, sehingga mampu berperan sebagai badan usaha yang sehat dan efisien yang selanjutnya dapat meningkatkan sumbangan bagi ekonomi Indonesia.
    - Meningkatkan kemandirian dan mendorong Persero untuk menjual saham kepada masyarakat.
    - Menyelaraskan Persero dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang titik beratnya bahwa mekanisme kerja Persero dilakukan oleh tiga organ yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi.
2. Menteri Keuangan mewakili Pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, perorangan atau Badan Hukum untuk mewakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Pengangkatan dan pemberhentian direksi Persero dilakukan oleh RUPS, dan dalam hal ini Menteri Keuangan bertindak sebagai RUPS, pengangkatan Direksi dilakukan oleh Menteri Keuangan.

4. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris Persero dilakukan oleh RUPS.
5. a. Pengusulan RKAP dilakukan oleh Direksi dan pengesahannya oleh RUPS.
   b. Dalam hal Persero selama 2 tahun berturut-turut kinerjanya sehat, pengesahan RKAP dilakukan oleh Komisaris.
6. Pengesahan perhitungan tahunan Persero (laporan keuangan) harus dilakukan oleh akuntan publik atau BPKP.
7. Status pegawai Persero adalah sebagai pekerja yang pengangkatan dan pemberhentian, hak serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
8. Bagi Persero tidak berlaku ketentuan :
   - Eselonisasi jabatan pegawai negeri.
   - Pelaksanaan APBN.
   - Penjualan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara.
9. Seluruh dokumen yang berhubungan dengan kegiatan Persero yang selama ini dikelola oleh departemen teknis, harus diserahkan kepada Menteri Keuangan paling lambat 17 April 1998.

Setelah mengalami beberapakali perubahan status, maka saat ini bentuk dan badan hukum perusahaan adalah Perusahaan Perseroan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

II.4 Bidang Pekerjaan PT. Kereta Api Indonesia

Bidang pekerjaan perusahaan mempunyai 2 misi yaitu sosial dan misi profit. Misi sosial adalah melakukan angkutan penumpang dan atau barang secara massal untuk sistem transportasi nasional (SISTRANAS), sedangkan misi profit adalah memberi keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

II.5 Bidang Pekerjaan Divisi tempat Kerja Praktek

Divisi tempat kerja praktek adalah DAOP 1 yang merupakan divisi yang bertanggung jawab penuh dalam hal mengendalikan dan mengawasi jalur perjalanan kereta api dengan daerah operasionalnya adalah dari stasiun Cikampek sampai stasiun Kota.

II.6 Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia

Organisasi merupakan suatu wadah atau tempat dimana proses pencapaian tujuan terjadi melalui organisasi lain. Tujuan ini merupakan pedoman ke arah mana organisasi itu dibawa, landasan organisasi yang bersangkutan dan tujuan organisasi organisasi yang akan menentukan prosedur.

Jenis-jenis organisasi dapat dibedakan atas tiga golongan :

1. Organisasi Garis

   Yaitu suatu organisasi dimana setiap atasan mempunyai sejumlah bawahan. Masing-masing bawahan memberikan pertanggungjawaban kepada atasan akan pelaksanaan tugasnya.

2. Organisasi Fungsional

   Yaitu suatu organisasi dimana tiap-tiap atasan tidak mempunyai sejumlah bawahan. Tugas masing-masing dari pejabat ini dapat menerima perintah dari setiap orang yang setingkat dengan kedudukannya. Sebaliknya setiap atasan atau pejabat ini mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan atas suatu segi kepada atasannya yang bertanggungjawab dalam segi itu.

3. Organisasi Garis dan Staff

   Yaitu suatu organisasi dimana setiap atasan mempunyai bawahan. Bawahan hanya menerima perintah dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasannya.

   Bagan Struktur Organisasi PT. KAI Divisi Jabotabek (lampiran).

   Penjelasan nama bagian dan tugas-tugas struktur Organisasi.

   1. KDT : Kepala Dipo Traksi

      Orang yang mengepalai/bertanggungjawab penuh di Dipo.

   2. KOR : Kepala Organisasi Rencana

      Orang yang menyusun rencana permintaan barang atau spare part KRD.

   3. KRLOS L : Kepala Ruas Los Listrik

      Orang yang mengepalai bagian perbaikan KRL.

   4. KRLOS D : Kepala Ruas Los Diesel

      Orang yang mengepalai bagian perbaikan KRD.

   5. KR ADM : Kepala Ruas Administrasi

      Orang yang mengepalai pada administrasi pegawai.

6. Pengawas Bodi

   Pengawasan yang mengawasi keadaan/membidangi bodi KRD

7. Pengawas Bogi

   Pengawasan yang mengawasi keadaan/membidangi bagian chasis termasuk roda.

8. Pengawas MC

   Pengawasan mounli check yang membidangi seluruh perbaikan KRD.

9. Pengawas PB

   Pengawasan perbaikan yang membidangi seluruh perbaikan.

10. Regu Bodi

    Orang yang mengerjakan sebagai pelaksana pengawasan bodi.

11. Regu Bogi

    Orang-orang yang melaksanakan tugas atau mengerjakan dari pengawasan.

12. Regu MC

    Orang yang mengerjakan perintah dari pengawas MC.

13. Regu PB

    Orang yang mengerjakan perintah dari pengawas PB.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM